

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam pembangunan bangsa, karena pendidikan dapat mengubah keadaan suatu bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu:

Tujuan penyelenggaraan pendidikan mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, beretos kerja dan disiplin, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, memasyarakatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai luhur budaya bangsa yang menjiwai perilaku manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003).

Berdasarkan tujuan tersebut, pendidikan diharapkan mampu mewujudkan dan mengembangkan karakter yang dimiliki oleh peserta didik dalam menjalani kehidupan di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Pendidikan yang baik juga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmadi (2003, hlm. 69) bahwa “Pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara yang tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaannya”.

Berdasarkan pernyataan di atas, Pendidikan Kewarganegaraan juga bisa diberikan secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk membantu peserta didik mencapai kedewasaannya. Agar peserta didik memiliki kedewasaan dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) yang baik, maka dapat dilakukan melalui kegiatan – kegiatan ekstrakurikuler maupun melalui mata pelajaran di sekolah. Mata pelajaran di sekolah yang memiliki peran penting dalam pembinaan karakter adalah mata pelajaran PKn. Hal ini sebagaimana menurut Somantri (1976, hlm. 35) menjelaskan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang mengajarkan tentang

sopan santun, moral, bertanggung jawab dan tingkah laku agar tidak terjerumus pada hal negatif. Maka guru PKn sangat berperan penting dalam mengendalikan dan perilaku anak atau peserta didik”.

Lebih lanjut, menurut Mahoney (dalam Suriakusumah dkk, 1999, hlm. 35) menjelaskan bahwa:

Civic education includes and involves those teaching that type of teaching method, those student activities, these administrative and supervisory procedures which the school may utilise purposively to make for better living together in the democratic way or (synonymously) to develop better civic behavior.

Definisi tersebut telah memasukan berbagai kegiatan sekolah, metode mengajar, kegiatan siswa, administrasi dan pengawasan sesuai dengan tujuan sekolah untuk mengembangkan karakter warga negara yang baik. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah yang memiliki beberapa komponen yaitu *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic disposition*. Menurut Branson (dalam Winarno, 2013, hlm. 177) menyatakan bahwa “*The third essential component of civic education, civic dispositions, refers to the traits of private and public character essential to the maintenance and improvement of constitutional democracy*”.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *civic disposition* merupakan komponen ketiga dari Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki esensi untuk mengembangkan dan meningkatkan demokrasi konstitusional. *Civic disposition* menunjukkan karakter publik maupun karakter privat yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karakter publik berhubungan dengan kepedulian, kesopanan, berpikir kritis dan kemampuan untuk bernegosiasi. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan harkat martabat. Pembinaan karakter di sekolah merupakan upaya yang perlu didukung dengan baik agar menghasilkan peserta didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Proses pembinaan karakter kewarganegaraan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai program salah satunya adalah melalui tata tertib sekolah.

Tata tertib sekolah merupakan unsur yang penting dalam proses pendidikan. Dengan demikian, terciptalah kondisi dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) siswa seperti ketaatan, kepatuhan, ketertiban dan kedisiplinan. Tata tertib merupakan ketentuan yang harus dipatuhi dan diikuti bersama. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hasnun (2010, hlm. 61) bahwa fungsi tata tertib sekolah adalah sebagai berikut :

- a) Diikuti dan ditaati bersama;
- b) Sebagai pengontrol dalam tindakan;
- c) Meningkatkan kedisiplinan;
- d) Memberi motivasi untuk berbuat dan bertindak positif;
- e) Menanamkan kecintaan dan rasa memiliki terhadap sekolah dan
- f) Patokan dan acuan dalam setiap tindakan.

Berdasarkan pendapat tersebut, tata tertib di sekolah memiliki banyak manfaat yaitu sebagai pengontrol tingkah laku siswa dan menjadi acuan siswa dalam bertindak. Akan tetapi, pelaksanaan tata tertib sekolah saat ini banyak sekali yang diabaikan oleh para siswa. Siswa kurang mepedulikan apa yang dilarang di dalam sekolah. Mereka lebih senang bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kenakalan remaja di sekolah saat ini semakin meningkat. Dari pelanggaran terkecil bahkan sampai pelanggaran yang besar. Contoh pelanggaran kecil misalnya saja cara mereka berpenampilan. Banyak siswa SMA sekarang yang seragam sekolahnya dibuat tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Mereka lebih memilih membuat seragam yang sesuai karakter mereka masing-masing atau bahkan mengikuti *trend mode* saat ini. Masalah potongan rambut yang tidak sewajarnya, masalah warna sepatu dan lain sebagainya.

Berdasarkan pra penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, salah satu sekolah yang telah menggunakan sistem poin dalam pelaksanaan tata tertibnya adalah SMA Negeri 1 Subang. SMA Negeri 1 Subang merupakan salah satu sekolah yang menerapkan sistem poin sejak lama pada tata tertibnya. Dengan diberlakukannya sistem poin ini, para guru menjadi sangat terbantu. Sebelum diberlakukannya sistem poin pada tata tertibnya, guru-guru yang biasanya menangani masalah pelanggaran siswa kewalahan dalam mengatur

siswanya. Dari berbagai pelanggaran peraturan sekolah yang sering terjadi, menuntut sekolah untuk memberikan peringatan atau hukuman seefektif mungkin untuk menanggulangi peningkatan pelanggaran peraturan sekolah yang dilakukan oleh siswa. Setelah diberlakukan sistem poin guru-guru menjadi mudah dalam memberikan sanksi terhadap siswa yang melanggar. Akibatnya siswa yang melanggar menjadi jera dan tidak mengulangnya lagi.

Berikut ini merupakan tabel jumlah poin pelanggaran peserta didik pada tahun ajaran 2014/2015.

Tabel 1.1

Jumlah Poin Pelanggaran Tiap Angkatan Tahun Ajaran 2014/2015

NO	JENIS PELANGGARAN	KELAS X	KELAS XI	KELAS XII
1	Terlambat	99	377	1.060
2	Kerapihan Pakaian	80	95	99
3	Kerapihan Rambut	5	-	10
4	Sepatu Dan Kaos Kaki	25	30	115
5	Berkelahi	-	-	-
6	Merokok	-	-	-
7	Kelengkapan Atribut	255	113	319
8	Kesopanan	-	-	-
9	Kehadiran Piket	5	-	5
Jumlah		469	615	1.608

(Sumber: Diolah oleh Peneliti 2016)

Berdasarkan tabel di atas, terbukti dengan telah diberlakukannya sistem poin pada tata tertib sekolah tidak semua peserta didik menaatinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak sekolah sistem poin telah dijalankan di SMA Negeri 1 Subang sejak tahun ajaran 2000/2001. Poin yang dicantumkan berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. SMA Negeri 1 Subang memberi batasan poin 100 terhadap siswa yang melakukan pelanggaran dan apabila siswa mencapai poin tersebut maka siswa yang bersangkutan akan dikeluarkan dari sekolah. Sementara itu, dalam poin-poin tertentu siswa akan mendapat peringatan dari guru.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang penerapan sistem poin yang dilakukan oleh pihak sekolah sebagai upaya meningkatkan *civic disposition* siswa dengan judul “Penerapan

Muhammad Rakhman Firdaus, 2016

PENERAPAN SISTEM POIN DALAM MENINGKATKAN CIVIC DISPOSITION SISWA TERHADAP TATA TERTIB SEKOLAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sistem Poin dalam Meningkatkan *Civic Disposition* Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah (Studi Deskriptif di SMA Negeri 1 Subang).

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Rumusan Masalah Umum

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan umum dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan sistem poin dalam meningkatkan *civic disposition* siswa terhadap tata tertib sekolah?”

2. Rumusan Masalah Khusus

Agar penelitian ini lebih terfokus pada pokok permasalahan serta mempermudah peneliti dalam pengumpulan data, maka pokok permasalahan tersebut dijabarkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan tata tertib sekolah dengan menggunakan sistem poin di SMA Negeri 1 Subang?
2. Bagaimana efektivitas sistem poin terhadap peningkatan *civic disposition* siswa di SMA Negeri 1 Subang?
3. Bagaimana hambatan penerapan sistem poin dalam meningkatkan *civic disposition* peserta didik terhadap tata tertib di SMA Negeri 1 Subang?
4. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penerapan sistem poin untuk meningkatkan *civic disposition* peserta didik terhadap tata tertib di SMA Negeri 1 Subang?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan masalah yang dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem poin dalam meningkatkan *civic disposition* terhadap tata tertib sekolah di SMA Negeri 1 Subang.

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan antara lain sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tata tertib sekolah dengan menggunakan sistem poin di SMA Negeri 1 Subang
- b. Untuk mengetahui efektivitas sistem poin terhadap peningkatan *civic disposition* siswa di SMA Negeri 1 Subang
- c. Untuk mengetahui hambatan penerapan sistem poin dalam meningkatkan *civic disposition* peserta didik terhadap tata tertib di SMA Negeri 1 Subang.
- d. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan penerapan sistem poin dalam meningkatkan *civic disposition* peserta didik terhadap tata tertib di SMA Negeri 1 Subang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya pada jenjang pendidikan SMA pada mata pelajaran PKn. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dari Segi Teoritis

Memberikan pengetahuan kepada guru, siswa dan pembaca terkait cara-cara meminimalisir tingkat pelanggaran di sekolah serta sebagai referensi umum untuk sekolah-sekolah lain.

2. Dari Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan suatu kebijakan atau program yang dapat membina karakter kewarganegaraan siswa.

3. Dari Segi Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

a. Bagi Penulis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca mengenai penerapan sistem poin di sekolah untuk meningkatkan karakter kewarganegaraan siswa.

- 2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak yang akan melakukan penelitian tentang penerapan sistem poin di sekolah.

b. Bagi Guru PKn

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan strategi bagi guru dalam meningkatkan *civic disposition* siswa.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi guru selama ini yang berkaitan dengan karakter kewarganegaraan

c. Bagi Siswa

- 1) Memberikan pemahaman kepada siswa tentang penerapan sistem poin untuk meningkatkan *civic disposition* siswa terhadap tertib sekolah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan siswa terhadap *civic disposition* melalui penerapan sistem poin.

d. Bagi Sekolah

- 1) Membina siswa yang memiliki karakter kewarganegaraan sebagai upaya terwujudnya sekolah yang berkualitas.
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kegiatan yang mengarah kepada pembinaan *civic disposition* siswa.

4. Dari Segi Aksi Sosial

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan *civic disposition* siswa selama ini yang kurang tersentuh secara optimal
- 2) Menjadikan siswa memiliki karakter kewarganegaraan yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat (*to be good citizenship*).

E. Struktur Organisasi Skripsi

Untuk memperjelas dalam mengetahui garis besar penyusunan skripsi ini, maka dibuatlah struktur organisasi skripsi, bagian ini menyajikan tentang urutan penulisan atau sistematika:

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi

2. Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas dan memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian
3. Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan.
4. Bab IV Temuan dan Pembahasan, bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.
5. Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara penulisan simpulan, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan cara uraian padat.